

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pendidikan bukanlah kegiatan yang sederhana, melainkan kegiatan yang dinamis. Mempertimbangkan adanya dinamika penyelenggaraan pendidikan, pendidikan memerlukan manajemen yang baik agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (Sisdiknas : 1) pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 (Sisdiknas : 6) Bab II pasal 3 Dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ditegaskan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 (Sisdiknas : 6) Bab III pasal 4 dan 6 bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa rumusan tersebut sebagai pengarah pendidikan nasional yang mengarah kepada terbinanya manusia, namun hal tersebut merupakan suatu tujuan yang ideal dan sulit untuk terealisasi.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 (Sisdiknas : 24) pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, emosional dan kejiwaan peserta didik.

Apabila melihat dari undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1. Pendidikan formal harus memenuhi keperluan pendidikan, akan tetapi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, sehingga dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*zharaf makan*) dari akar “*darasa*”. Secara harfiah “*Madrasah*” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”. Dari akar kata “*darasa*” juga bisa diturunkan dengan kata “*Midras*” yang mempunyai

arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”, kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab Taurat” (Jaja Jahari, 2013:13).

Kata “Madrasah” juga ditemukan dalam bahasa Hebreu atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu “darasa”, yang berarti “membaca dan belajar” atau “tempat duduk untuk belajar”. Dari kedua tersebut, kata “Madrasah” mempunyai arti yang sama “tempat belajar”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata “Madrasah” memiliki arti “sekolah” kendati pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola* (Jaja Jahari, 2013: 3-4).

Madrasah perlu peningkatan manajemen sarana prasarana yang merupakan faktor penting untuk menentukan apakah sebuah proses pembelajaran bisa berjalan efektif atau justru sebaliknya. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik dibutuhkan alat dan media yang digunakan sebagai penunjang. Sebagai contoh, proses pendidikan tidak bisa berjalan dengan efektif jika ruang kelas yang digunakan sebagai tempat belajar tidak terawat atau bahkan sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu pengelolaan terhadap sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Madrasah sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen madrasah dan harus meningkatkan sarana prasarana pendidikan.

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Jaja Jahari, 2013: 1). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien (Bafadal: 2003).

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa: 2004)..

Dalam organisasi pendidikan termasuk pengelolaan dalam pendidikan di perlukan manajemen yang aktif. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan manajemen sarana prasarana di sekolah. Suksesnya pembelajaran di sekolah di dukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan ini dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana prasarana di sekolah bisa berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Desember 2015 diperoleh kenyataan bahwa Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota

Bandung sudah ada upaya dalam meningkatkan manajemen sarana prasarana. Misalnya dalam pengadaan sarana prasarana Madrasah Aliyah Nurul Iman sudah ada upaya untuk meningkatkannya, tetapi karena anggaran keuangan tidak mencukupi untuk membangun kelas baru jadi Madrasah Aliyah Nurul Iman menerima bantuan dari pemerintah melalui RKB & Rehab.

Madrasah Aliyah Nurul Iman adalah salah satu sekolah yang sarana prasarannya cukup memadai, hanya saja dikarenakan lembaga yayasan jadi Madrasah Aliyah Nurul Iman menyatu memakai gedung dengan Madrasah Tsanawiyah di Nurul Iman. Dalam prestasi di bidang keagamaan Madrasah Aliyah Nurul Iman sangat bisa bersaing namun dalam ekstra kurang.

Ada beberapa sarana prasarana juga yang kurang memenuhi standarisasi sarana prasarana misalnya, perpustakaan yang disatukan dengan ruang guru, dan ruang OSIS ditiadakan.

Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 14 desember 2015 di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung terdapat masalah tentang sarana prasarana yang masih kurang optimal, perlu ditingkatkan dalam manajemen sarana prasarana karena belum memenuhi standar pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Maka muncul beberapa masalah mendasar diantaranya : Apa yang menjadi latar belakang manajemen sarana prasarana? Bagaimana pelaksanaan manajemennya? Bagaimana hasil yang telah dicapai selama ini? Jika berhasil apa saja faktor penunjangnya?

Untuk mengetahui dan menjawab semua permasalahan tersebut, maka menarik untuk diteliti dengan mengangkat judul: **Manajemen Sarana Prasarana Madrasah (Penelitian di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar alamiah Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
2. Bagaimana menentukan kebutuhan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
3. Bagaimana proses pengadaan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
4. Bagaimana pendistribusian sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
5. Bagaimana pemakaian sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
6. Bagaimana pencatatan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?
7. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat manajemen sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar alamah Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana menentukan kebutuhan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui proses pengadaan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pendistribusian sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pemakaian sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pencatatan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat manajemen sarana prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian ini penting karena menghasilkan uraian yang akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang dibahas yaitu manajemen sarana prasarana

- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang manajemen sarana prasarana
2. Manfaat praktis
    - a. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Iman pada Khususnya mengenai Manajemen Sarana Prasarana
    - b. Memperluas khasanah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai manajemen sarana prasarana

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Lexy Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ada pun menurut Kirk dan Miller dalam buku Lexy Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Jaja Jahari, 2013: 1). Sedangkan menurut John D.



Miller memberi pengertian manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah di organisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran (Mulyasa: 2004 : 83)

Depdiknas (2008: 37), telah membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah. Berkaitan dengan ini prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Dengan begitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses proses yang dilakukan dalam upaya pengadaan dan pedayagunaan, meliputi perencanaan, pengadan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Kelima proses tersebut dapat dipadukan sehingga membentuk suatu siklus manajemen sarana dan prasarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi

secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan (Mujamil Qomar, 2007:171)

Sarana prasarana adalah proses pengelolaan terhadap seluruh perangkat, alat, bahan dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar sehingga proses kegiatan belajar bisa berjalan secara efektif. Suharsimi Arikunnto (2002) menjelaskan bahwa sarana pendidikan memiliki beberapa klasifikasi yang bisa dibedakan sebagai berikut:

1. Bangunan sekolah (tanah dan gedung) yang meliputi: lapangan, halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, kantor, ruang praktek, ruang tamu, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, laboratorium, mushola dan kamar kecil.
2. Perabot sekolah yang meliputi: meja guru, meja murid, kursi, lemari, rak buku, sapu dan kotak sampah.

Sarana sekolah meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana sekolah mencakup semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah (Hendyat Soetopo dan Wasti Soemanto, 1982: 183) sebagai contoh sarana sekolah adalah gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain sedangkan prasarana sekolah adalah : jalan menuju sekolah, tempat pekarangan kebun dan halaman sekolah.

Secara rasional sebelum dituangkan kedalam suatu perencanaan, maka seorang perencana yang baik memulai terlebih dahulu dengan suatu pola penyusunan program sebagai titik pijakannya.

1. Pola pikiran bagi penyusunan program bangunan harus memperhatikan :
  - a. Ukuran dan umur penghuni
  - b. Jumlah siswa sebagai penghuni
  - c. Macam perabot yang harus ada di dalam
  - d. Jumlah perabot
  - e. Penataan perabot
  - f. Cara pemakaian
  - g. Masa pemakaian
  - h. Macam bahan
  - i. Pembiayaan dan pemeliharaan
2. Sedangkan untuk perlengkapan dan perabot perlu memerhatikan:
  - a. Macam perabot
  - b. Cara pemakaian
  - c. Bentuk perabot
  - d. Konstruksi perabot
  - e. Ukuran perabot
  - f. Jumlah perabot/ perlengkapan
  - g. Warna perabot
  - h. Macam bahan
  - i. Mutu bahan

- j. Harga bahan
- k. Biaya pembuatan dan pemeliharaan

Hasil pemikiran yang telah mantap, kemudian dituangkan kedalam bentuk perencanaan yang visibel, karena telah mempertimbangkan segi-segi penunjangnya. Menurut Engelhard N.L dkk dalam (Y. Manusung, 1991: 49-50) menyarankan agar :

1. Perencanaan harus secara komprehensif, sehingga pembangunan dan perluasnya merupakan perpaduan yang serasi, selaras dan seimbang antara program pendidikan dengan kebutuhan maupun keadaan masyarakat sekitar.
2. Proses perencanaan arsitekturnya mulai dari mengatur: menetapkan spesifikasi macam dan bentuk bahan bangunan yang akan dipakai; berikut karyawan yang akan mengerjakan harus dipertimbangkan baik-baik untuk menghindari kegagalan, bahkan musibah sosial yang akan terjadi.
3. Konstruksi bangunan dari awal harus direncanakan untuk perluasan dan perkembangan di kemudian hari.

Jaja Jahari (2013: 85) menyebutkan pengelolaan sarana prasarana merupakan aktifitas komprehensif yang berkaitan dengan pengelolaan segala bentuk kebutuhan proses pendidikan, diantara kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana adalah:

1. Menentukan kebutuhan

Analisis kebutuhan ini berkaitan dengan proses mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan alat ataupun sumber data yang dibutuhkan

dalam sebuah proses pembelajaran. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan, pihak sekolah juga bisa melibatkan masyarakat sekolah dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana.

## 2. Proses pengadaan

Proses pengadaan merupakan proses lanjutan dari analisis kebutuhan, proses pengadaan merupakan proses mendatangkan alat atau barang yang menjadi proses kegiatan belajar mengajar. Proses pengadaan barang ini bisa melalui pembelian, pemberian hadiah dan sumbangan baik dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat.

## 3. Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan kegiatan penyerahan barang dan tanggung jawab kepada orang-orang yang akan menggunakan sarana prasarana tersebut.

## 4. Pemakaian

Pemakaian merupakan proses optimalisasi fungsi sarana dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian sarana dan prasarana pendidikan, yaitu :

- a. Pentingnya penyusunan jadwal penggunaan, harus dihindari benturan dengan kelompok lainya.
- b. Kegiatan-kegiatan pokok sekolah harus dijadikan sebagai prioritas utama.
- c. Waktu pemakaian hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran.

- d. Penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian dengan bidangnya, misalnya: petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer dan sebagainya.
- e. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antara kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas, (Tim Dosen Administrasi Pendidikan, 2003: 56)

#### 5. Pencatatan/inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini harus disediakan instrument administrasi antara lain buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventaris, buku golongan inventaris, buku bukan inventaris dan buku stok barang.

Mujamil Qomar (2007:171) menyebutkan sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan berikut ini:

1. Lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat, dan awet
2. Rapi, indah, bersih, anggun, dan asri sehingga menyejukan pandangan dan perasaan siapa pun yang memasuki kompleks lembaga pendidikan Islam
3. Kreatif, inovatif, responsife, dan variatif sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi peserta didik
4. Memiliki jangkauan waktu penggunaan yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar-pasang bangunan

5. Memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti mushala atau masjid

Penataan sarana dan prasarana jarang sekali terjadi dalam lembaga pendidikan Islam, apalagi merawat budaya penataan ini. Budaya dikalangan umat Islam memang kurang menguntungkan untuk program perawatan tersebut sebab mereka lebih bersemangat mewujudkan sesuatu daripada merawatnya. Hal ini membutuhkan perhatian juga bagi manajer lembaga pendidikan Islam untuk mentradisikan perawatan tersebut di dalam lembaga pimpinannya.

Program perawatan ini bisa disebut program perawatan preventif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah, melestarikan kerapian dan keindahan, serta menghindarkan dari kehilangan atau setidaknya meminimalisasi kehilangan.

Program perawatan ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Membentuk tim pelaksana perawatan preventif di sekolah.
2. Membuat daftar sarana prasarana, termasuk seluruh perawatan yang ada di sekolah.
3. Menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan dan fasilitas sekolah.
4. Menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian di sekolah.

5. Memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja penataan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana prasarana sekolah.

Hunt Pierce dalam Y. Masumung (1991: 15-16) menyebutkan prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan:

1. Lahan, bangunan perabot dan perlengkapan sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan.
2. Perencanaan lahan, bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat.
3. Lahan, bangunan perabot dan perlengkapan sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak didik, demi terbentuknya karakter atau watak mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar bekerja dan bermain sesuai dengan bakatnya masing-masing.
4. Lahan, bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan manfaatnya bagi anak-anak murid dan guru.
5. Administrator sekolah harus dapat membantu program sekolah secara efektif melatih para petugas serta memiliki alatnya dan cara



menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya.

6. Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kuantitatif dan kualitatif serta menggunakannya dengan tepat guna lahan, bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah.
7. Sebagai penanggung jawab sekolah harus mampu menggunakan serta memelihara bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat sekitarnya.
8. Sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus juga memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak didiknya, sanggup menata dan memliharnya.

Ibrahim Fadal (2003:5) menjelaskan secara rinci tentang tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana yang baik, secara tepat dan efisien.

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaanya selalu dalam kondisi siap pakai oleh semua pihak sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) no 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana dijelaskan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan pada level MA/SMA setidaknya kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi antara lain:

1. Ruang kelas
2. Ruang perpustakaan
3. Laboratorium biologi
4. Laboratorium fisika
5. Laboratorium kimia
6. Laboratorium komputer
7. Laboratorium bahasa
8. Ruang kepala sekolah
9. Ruang guru
10. Ruang TU
11. Tempat beribadah
12. Ruangan BK/BP
13. Ruang UKS
14. Ruang organisasi kesiswaan
15. WC



16. Gudang

17. Lapangan Olah raga

Pendidikan merupakan kegiatan internalisasi dan pewarisan nilai budaya dalam masyarakat. Dari sudut pendekatan kebudayaan, proses dan keberadaan pendidikan dapat diamati dari berbagai wujud ekspresi budaya dalam berbagai bentuknya. Dapat diamati dari nilai, ide dan gagasannya dari aktifitas yang dilakukannya, dan dari wujud benda fisik sarana dan bekas-bekas yang pernah ditinggalkannya sebagai hasilnya. Seperti menurut Koentjaraningrat (2009: 150), bahwa wujud kebudayaan itu ada tiga, yaitu :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola mantap dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan teori kebudayaan sebagai landasan ilmunya. Atas dasar itu, ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dijadikan dasar sistematisasi rumusan masalah untuk menganalisis deskriptif Manajemen Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Nurul Iman Kota Bandung terkait dengan alasan dipilihnya Manajemen Sarana Prasarana tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor penunjang adalah segala hal yang membantu dan mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam mencapai tujuan. Sedangkan faktor

penghambat adalah segala hal yang dapat mempengaruhi, memperlambat terhadap pelaksanaan pendidikan dalam meraih tujuan.

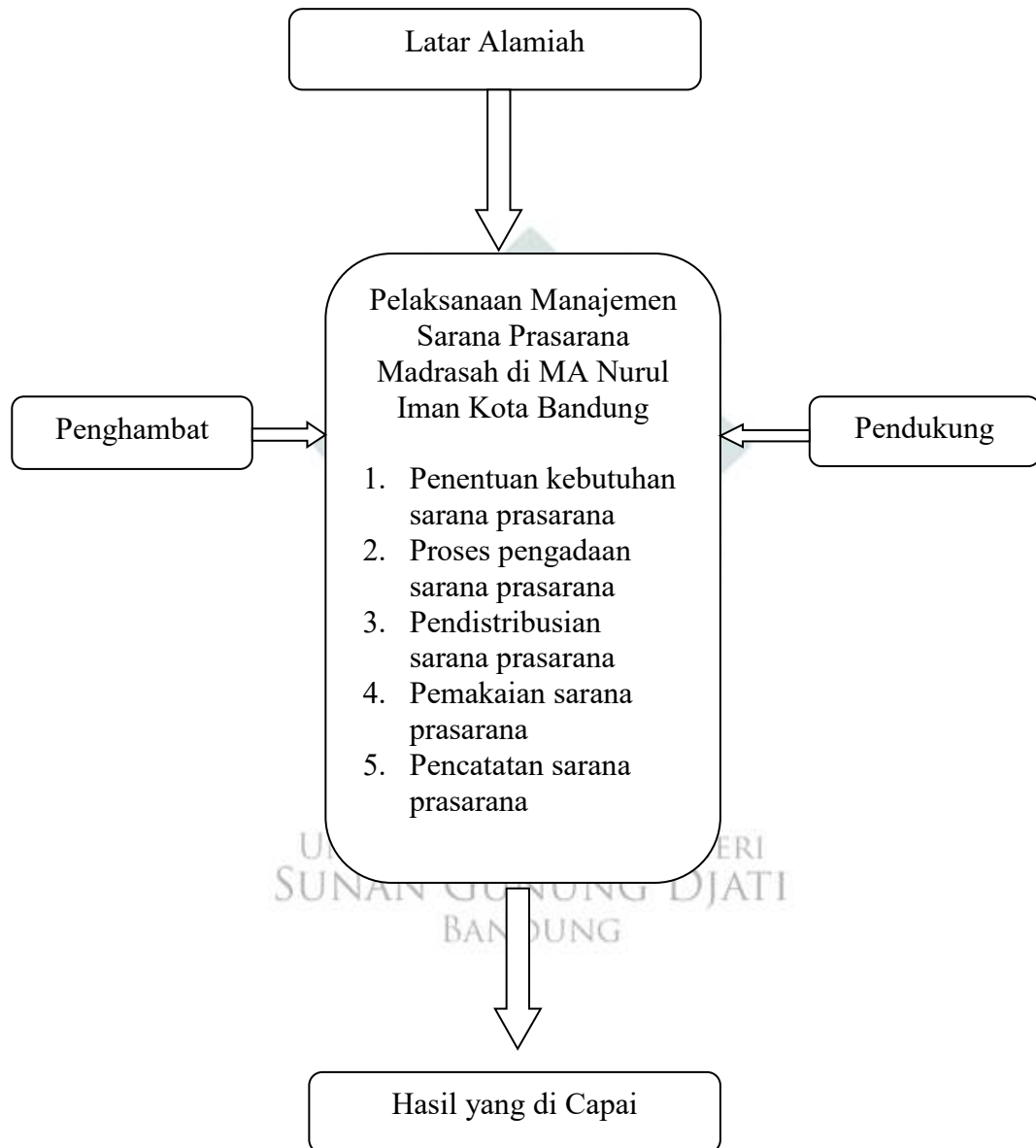
Faktor penunjang dan penghambat merupakan usaha untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem, sehingga dengan ditemukannya faktor-faktor itu dapat mengevaluasi Manajemen Sarana Prasarana Madrasah. Kajian mengenai faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pada tingkat keberhasilan sebuah manajemen, dengan demikian usaha meniru suatu manajemen akan selalu diukur keberhasilannya, dan berupaya mencegah timbulnya faktor pendukung dan faktor penghambat.



Secara skematis Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dibawah ini:

### MANAJEMEN SARANA PRASARANA MADRASAH

(Penelitian di MA Nurul Iman Kota Bandung)





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG